

## Analisis Penerimaan PAD Pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tebo

**Eko Purnarianto**

Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tebo

### **Abstract.**

This study aims to analyze potential, efficiency, effectivity and contribution of PAD admission at Department of Fishery and Animal Husbandry in Tebo Regency including the strategy establishment to increase its revenue. The analysis used is a potential formula, efficiency ratio, effectivity ratio, contributions ratio and SWOT analysis. The results shows that the potential revenue of retribution slaughterhouse (RPH), the potential sales of livestock, and potential sales fishery product are beyond the current target. The efficiency level of retribution slaughterhouse (RPH) and sales of fishery product is poor, but the sales of livestock is very efficient. Effectivity level of livestock and fishery product sales are low, while retribution slaughterhouses (RPH) is not effective regarded to its potential but in the contrary for its target. Contribution of PAD admission of Fishery and Animal Husbandry Department is very low regarded Tebo Regency PAD. The result of SWOT analysis of retribution slaughter house (RPH) admission using WO (Weakness-Opportunity) strategy, livestock sales using SO (Strength-Opportunity) strategy, and fishery product sales using ST (strength-threat) strategy.

---

*Keywords: Retribution SlaughterHouse (RPH), Sales of Fishery, Livestock Sales, SWOT Analysis*

### **Abstrak.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi, efisiensi, efektivitas dan kontribusi penerimaan PAD pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tebo serta menetapkan strategi untuk peningkatan penerimaan PAD. Analisis yang digunakan adalah rumus potensi, rasio efisiensi, rasio efektivitas, rasio kontribusi dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi penerimaan retribusi rumah potong hewan (RPH), potensi penjualan hasil peternakan, potensi penjualan hasil perikanan lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Tingkat efisiensi retribusi RPH dan penjualan hasil perikanan tidak efisien, penjualan hasil peternakan sangat efisien. Tingkat efektivitas penjualan hasil peternakan dan penjualan hasil perikanan tidak efektif, retribusi RPH tidak efektif berdasarkan potensi dan sangat efektif berdasarkan target. Kontribusi penerimaan PAD Dinas Perikanan dan Peternakan sangat kurang terhadap PAD Kabupaten Tebo. Hasil analisis SWOT penerimaan retribusi RPH menggunakan strategi WO (Weakness-Opportunity), penjualan hasil Peternakan menggunakan strategi SO (Strength-Opportunity), dan penjualan hasil perikanan menggunakan strategi ST (Strength-Threat).

---

*Kata Kunci : Retribusi Rumah Potong Hewan, Penjualan Hasil Perikanan, Penjualan Hasil Peternakan, Analisis SWOT.*

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sendiri. Untuk itu diperlukan kemampuan pembiayaan daerah dalam menjalankan kewajibannya. Kemampuan daerah dalam menyediakan pendanaan yang berasal dari dalam daerah itu sendiri sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi untuk menciptakan perguliran dan dalam membiayai pembangunan daerah yang berkelanjutan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PAD merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Jika PAD meningkat, maka tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula. Sebaliknya semakin rendah penerimaan PAD suatu daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. (Tambunan dalam Devita, Delis, dan Junaidi, 2014).

Penerimaan PAD Kabupaten Tebo selama kurun waktu 2010 hingga 2015 menunjukkan adanya peningkatan pendapatan. Pertumbuhan PAD yang meningkat mengindikasikan ukuran kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan pungutan PAD yang telah dicapai selama enam tahun terakhir.

Meningkatnya pertumbuhan PAD Kabupaten Tebo setiap tahunnya hendaknya diikuti juga dengan meningkatnya kinerja pendapatan oleh SKPD terkait. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tebo merupakan SKPD yang memiliki sumber PAD sektor perikanan dan peternakan. Usaha sektor perikanan dan peternakan berperan dalam struktur perekonomian Kabupaten Tebo saat ini. Hal ini dilihat dari laju pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian, kehutanan, perikanan dan peternakan setiap tahunnya tertinggi dari semua sektor lapangan usaha PDRB Kabupaten Tebo yakni sebesar 7,63% pada tahun 2014. Selain itu peran sektor perikanan dan peternakan dalam pembangunan Kabupaten Tebo dilihat juga dari PAD yang dihasilkan. Sumber PAD yang dihasilkan sektor perikanan dan peternakan antara lain :retribusi rumah potong hewan (RPH), penjualan hasil perikanan dan penjualan hasil peternakan.

Secara keseluruhan pertumbuhan penerimaan PAD pada Dinas Perikanan dan Peternakan mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Upaya peningkatan penerimaan ini hendaknya dapat dilakukan setiap tahunnya dan diiringi dengan penetapan target yang sesuai dengan potensi, seperti target penerimaan retribusi RPH lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan belum adanya dasar dalam penetapan target penerimaan PAD. Dinas Perikanan dan Peternakan harus menghitung potensi PAD terlebih dahulu sebelum melakukan penetapan target penerimaan dari masing-masing sumber PAD. Selain itu efisiensi dan efektivitas pemungutan penerimaan PAD pada instansi ini akan berpengaruh dalam memaksimalkan pendapatan yang secara langsung dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Tebo.

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis potensi, efektivitas dan efisiensi penerimaan PAD pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tebo; (2) menganalisis kontribusi penerimaan PAD Dinas Perikanan dan Peternakan terhadap PAD Kabupaten Tebo dan Komponennya; (3) menetapkan strategi dalam upaya peningkatan penerimaan PAD terutama yang berkaitan dengan retribusi RPH, penjualan hasil peternakan dan penjualan hasil perikanan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tebo.

## METODE PENELITIAN

### Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari tahun 2010 hingga 2015. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari berbagai publikasi instansi pemerintah serta regulasi yang terkait.

### Alat Analisis Data

#### Potensi

1. Perhitungan Potensi retribusi RPH diperoleh dengan formulasi :

$$P_{t_i} = J_{t_i} \times h_{t_i} \times d_{t_i} \times x_{t_i}$$

2. Perhitungan potensi penjualan hasil perikanan diperoleh dengan cara :
  - a. Menghitung produksi benih yang dapat dihasilkan oleh BBI dalam periode pemijahan perjenis ikan pertahun dilihat dari jumlah induk yang tersedia berdasarkan SNI produksi benih ikan kelas benih sebar dilihat dari persentase sintasan benih setiap tahap pemijahan.
  - b. Jumlah produksi benih yang dihasilkan dikalikan dengan harga jual benih perjenis ikan.
3. Perhitungan potensi penjualan hasil peternakan diperoleh dengan cara :
  - a. Menghitung produksi ternak milik pemerintah pertahun dilihat dari jumlah induk yang ada berdasarkan tabulasi PSPK 2011 Kabupaten Tebo, dengan menghitung persentase kelahiran dan kematian anak ternak pertahun.
  - b. Jumlah anak ternak pemerintah yang lahir (produksi ternak milik pemerintah pertahun) dikalikan dengan harga ternak.

#### Efisiensi

Rasio efisiensi digunakan untuk mengukur kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan dalam mengoptimalkan penerimaan PAD dengan biaya yang minimum. Rasio efisiensi dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$E_{\text{isiensi}} = \frac{\text{Biaya Perolehan}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

Biaya yang digunakan untuk memperoleh penerimaan pendapatan ditentukan oleh : jumlah dan kualitas tenaga pemungut, upah pungut, korupsi dan biaya-biaya lainnya (Tan, 2010). Kinerja SKPD Dinas Perikanan dan Peternakan dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 100% (semakin kecil rasio ini semakin baik).

#### Efektivitas

Rasio efektivitas digunakan untuk menunjukkan kemampuan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tebo dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan potensi yang ada. Namun ada juga yang menghitung rasio efektivitas dengan membandingkan realisasi dengan target penerimaan. Penelitian ini menggunakan dua rasio efektivitas untuk membandingkan tingkat efektivitas penerimaan PAD berdasarkan potensi riil yang dihitung sebelumnya dengan berdasarkan target yang ditetapkan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan. Rasio efektivitas dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$a. \text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Potensi Penerimaan}} \times 100\%$$

$$\text{b. Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Kemampuan memperoleh PAD dikategorikan efektif bila hasil rasio semakin besar demikian pula sebaliknya bila rasio semakin kecil maka kemampuan memperoleh PAD dikategorikan kurang efektif.

### **Kontribusi**

Kontribusi yang dihitung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kontribusi retribusi RPH terhadap retribusi jasa usaha, terhadap retribusi daerah, dan terhadap PAD
2. Kontribusi penjualan hasil peternakan terhadap hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, terhadap lain-lain PAD yang sah, dan terhadap PAD
3. Kontribusi penjualan hasil perikanan terhadap hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, terhadap lain-lain PAD yang sah, dan terhadap PAD
4. Kontribusi penerimaan PAD Dinas Perikanan dan Peternakan Terhadap PAD Kabupaten Tebo

Apabila hasil rasio ini semakin besar maka disebut kontribusinya sangat baik demikian pula jika semakin kecil rasio maka kontribusinya sangat kurang.

### **Analisis SWOT**

Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, and Threat*) merupakan alat analisis yang dapat digunakan untuk menyusun strategi peningkatan pendapatan berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tebo.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Potensi Retribusi RPH**

Besaran nilai potensi dari retribusi RPH dihitung berdasarkan tarif retribusi yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah dikalikan dengan jumlah pemotongan ternak yang ada di Kabupaten Tebo. Tarif retribusi RPH dibedakan untuk jenis ternak besar (sapi dan kerbau) dan ternak kecil (kambing dan domba). Tahun 2010 hingga maret 2013 masih menggunakan tarif berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 42 tahun 2001 tentang retribusi pemotongan ternak dan retribusi RPH dimana ternak besar dikenakan biaya sebesar Rp.20.000,-/ekor dan ternak kecil Rp.5.500,-/ekor, sedangkan April 2013 hingga 2015 menggunakan tarif berdasarkan Peraturan Bupati Tebo Nomor 33 tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan, dimana tarif Rp.50.000,-/ekor untuk ternak besar dan Rp 13.000,-/ekor untuk ternak kecil. Potensi penerimaan retribusi RPH dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1. Potensi dan Target Penerimaan Retribusi RPH Kab. Tebo Tahun 2010-2015**

Tahun	Potensi Retribusi RPH (Rp)		Total Potensi (Rp)	Target (Rp)
	Ternak Besar	Ternak Kecil		
2010	118.620.000	56.820.500	175.440.500	10.000.000
2011	136.940.000	59.433.000	196.373.000	12.500.000
2012	344.650.000	166.140.000	510.790.000	15.000.000
2013	188.450.000	170.430.000	358.880.000	15.000.000
2014	256.600.000	142.155.000	398.755.000	16.000.000
2015	215.800.000	132.301.000	348.101.000	15.000.000
Rata-rata	210.176.667	121.213.250	331.389.917	13.916.667

Sumber : Laporan Statistik Peternakan (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1, potensi retribusi RPH selama periode 2010-2015 berfluktuatif dengan rata-rata sebesar Rp 331.389.917,- yang terinci atas Rp 210.176.667,- untuk potensi ternak besar dan Rp 121.213.250,- untuk potensi ternak kecil, sementara rata-rata target penerimaan retribusi RPH sebesar Rp 13.916.667,- atau 4,20% dari potensi terhitung. Penetapan target yang lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya dan potensi yang ada diduga disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

1. Tidak adanya pemotongan ternak kecil di RPH  
Banyaknya pemotongan ternak kambing dan domba di Kabupaten Tebo seiring dengan maraknya usaha kuliner dan berkaitan dengan aktivitas keagamaan seperti aqiqah, namun tidak pernah dilakukan pemotongan di RPH.
2. Pemotongan ternak besar saat hari raya dan pesta tidak dilakukan di RPH  
Pemotongan ternak besar yang dilakukan di RPH selama ini hanyalah untuk memenuhi kebutuhan daging di Pasar Sarinah Rimbo Bujang dan Pasar Tanggo Rajo Muara Tebo dimana lokasi RPH yang tidak berjauhan dengan pasar tersebut. Sementara itu untuk keperluan pesta pernikahan dan pelaksanaan hari raya keagamaan, masyarakat masih cenderung untuk melakukan pemotongan sendiri.
3. Jumlah RPH hanya ada 2 di Kabupaten Tebo.  
Dengan luasan Kabupaten Tebo yang berjumlah 12 kecamatan, keberadaan 2 unit RPH masih kurang untuk melakukan pelayanan dalam pemeriksaan dan pemotongan hewan. Keengganan masyarakat untuk melakukan pemotongan di RPH dapat juga diakibatkan oleh lokasi RPH yang hanya berada di sekitar Pasar Tanggo Rajo Muara Tebo dan Pasar Sarinah Rimbo Bujang.
4. Sosialisasi  
Sosialisasi yang dilakukan selama ini oleh dinas terkait masih sebatas kepada pedagang daging yang memotong ternak sendiri di pasar. Hendaknya sosialisasi ini juga diadakan kepada masyarakat luas. Jika untuk keperluan tertentu meskipun masyarakat tidak memotong ternaknya di RPH dapat meminta pemeriksaan ante mortem dan post mortem kepada petugas di UPTD Puskesmas dan RPH dan dikenai retribusi sebatas pemeriksaan tersebut. hal ini dapat pula meningkatkan penerimaan PAD retribusi RPH di Kabupaten Tebo.

Panggalo (2015) menyatakan adanya penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara yang mengatur tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, yang menjelaskan bahwa retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa dan atau fasilitas rumah potong hewan dan tempat pemotongan hewan di luar rumah potong hewan yang diizinkan oleh pemerintah termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Retribusi Rumah Potong Hewan yang tempat pemotongannya diluar RPH yang dikelola oleh DPPKAD, sementara retribusi RPH yang pemotongannya di dalam RPH dikelola oleh Dinas Peternakan. Pencapaian Retribusi Rumah Potong Hewan sesudah diterapkannya Peraturan tersebut mengalami peningkatan yang signifikan.

### **Potensi Penjualan Hasil Peternakan**

Besaran nilai potensi dari penjualan hasil peternakan dihitung berdasarkan jumlah produksi ternak milik pemerintah dikalikan dengan harga jual ternak. Untuk menghitung jumlah produksi ternak pemerintah berpedoman pada PSPK (Pendataan Sapi potong dan Kerbau) Kabupaten Tebo tahun 2011 dimana persentase kelahiran ternak rata-rata di Kabupaten Tebo sebesar 29% dari jumlah populasi induk dengan tingkat kematian 4%, sehingga produksi ternak pemerintah dihitung sebesar 25% dari populasi induk ternak pemerintah. Harga jual ternak ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Tebo

tentang penetapan harga jual anak ternak milik pemerintah. Potensi penjualan hasil peternakan dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 2. Potensi dan Target Penerimaan Penjualan Hasil Peternakan Kab. Tebo Tahun 2010-2015**

Tahun	Potensi (Rp)	Target (Rp)
2010	206.387.500	125.000.000
2011	194.892.500	200.000.000
2012	223.630.000	165.500.000
2013	225.055.000	165.500.000
2014	285.950.000	165.500.000
2015	206.150.000	165.500.000
Rata-rata	223.677.500	164.500.000

Sumber : Laporan Statistik Peternakan (data diolah)

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa potensi penjualan hasil peternakan tahun 2010-2015 berfluktuatif dengan rata-rata sebesar Rp.223.677.500,- sedangkan rata-rata target selama periode 2010 hingga 2015 sebesar Rp 164.500.000,- sehingga perbandingan potensi target yang ditetapkan berdasarkan potensi rata-rata sebesar 74,81%. Berfluktuatifnya potensi penjualan hasil peternakan disebabkan oleh :

- Menurunnya populasi ternak pemerintah yang digaduhkan  
Menurunnya jumlah populasi ternak pemerintah yang digaduhkan kepada masyarakat berpengaruh terhadap menurunnya jumlah setoran ternak berdasarkan perjanjian gaduhan ternak. Menurunnya populasi ternak tersebut dapat disebabkan kematian akibat penyakit berupa serangan virus dan bakteri, kehilangan ternak, dan perubahan regulasi pola perguliran ternak.
- Meningkatnya harga jual anak ternak  
Anak ternak yang lahir dan merupakan setoran atas perjanjian gaduhan ternak. Ternak setoran tersebut dijual berdasarkan harga yang telah ditetapkan dalam keputusan Bupati Tebo perkilogram ternak hidup. Dengan meningkatnya harga jual tersebut maka berpengaruh terhadap nilai potensinya.

### Potensi Penjualan Hasil Perikanan

Besaran nilai potensi dari penjualan hasil perikanan dihitung berdasarkan jumlah produksi benih ikan di BBI dikalikan dengan harga jual benih ikan. Untuk menghitung jumlah produksi benih ikan di BBI berdasarkan jumlah induk yang produktif dari jumlah induk yang tersedia dengan berpedoman pada SNI ikan kelas benih sebar. Berdasarkan SNI tersebut diketahui persentase telur ikan yang menetas hingga persentase kelulus hidupan benih ikan sampai dengan ukuran siap jual. Benih ikan yang dijual oleh UPTD BBI berada pada tahap pendederan ketiga (P III) dengan ukuran 5-8 cm. Harga jual benih ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Tebo tentang standar harga jual benih ikan pada BBI Sungai Alai Kabupaten Tebo. Potensi penjualan hasil perikanan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3. Potensi dan Target Penjualan Hasil Perikanan Kab. Tebo Tahun 2010-2015**

Tahun	Potensi (Rp)	Target (Rp)
2010	823.126.359	40.000.000
2011	402.345.288	100.000.000
2012	646.095.736	122.000.000
2013	1.285.483.465	122.000.000
2014	1.633.573.200	122.000.000
2015	3.833.733.120	122.000.000
Rata-rata	1.437.392.861	104.666.667

Potensi penjualan hasil perikanan sangat besar dan meningkat setiap tahunnya sedangkan target penerimaan pendapatan dari penjualan hasil perikanan cenderung tetap. Perbandingan besaran penetapan target terhadap potensi rata-rata sebesar 11,46%, pada tahun 2015 penetapan target penerimaan justru sebesar 3,18% dari potensi yang ada. Penetapan target penerimaan penjualan hasil perikanan tidak berdasarkan pada potensi yang seharusnya dimiliki, demikian juga dengan realisasi penerimaan yang masih belum dapat dimaksimalkan mengingat besarnya potensi yang dimiliki oleh BBI. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

a. Jumlah induk ikan

Untuk menghitung jumlah produksi benih ikan sesuai SNI kelas benih sebar berdasarkan jumlah induk ikan produktif. Perbandingan jumlah induk yang dimiliki dengan jumlah kolam induk dan kolam pendederan harus sesuai dengan ketentuan teknisnya sehingga produksi benih dari semua induk ikan dapat dioptimalkan. Jumlah induk yang berlebih atau kebanyakan membuat perhitungan potensi semakin besar. Selain itu perhitungan potensi pada penelitian ini mencakup semua jenis induk ikan yang tersedia, padahal dalam realisasinya tidak semua jenis ikan itu yang diproduksi benihnya oleh BBI dan tidak semua induk dapat dimaksimalkan produksinya akibat kolam pendederan yang terbatas, terdapat banyak kendala teknis seperti belum tersedianya pakan alami untuk larva, dan kurangnya SDM teknis perikanan.

b. Harga jual benih

Harga jual benih ikan BBI sesuai dengan Keputusan Bupati Tebo tentang standar harga benih ikan dibuat berdasarkan harga pasar benih ikan di Kabupaten Tebo. dengan harga jual yang sama dengan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) diharapkan BBI dapat bersaing untuk meningkatkan penjualan hasil perikanan. Harga jual benih tersebut masih terbilang tinggi dibandingkan daerah lain di Provinsi Jambi sehingga benih tidak dapat dijual keluar daerah. Untuk di dalam daerah sendiri BBI mempunyai pesaing dari UPR yang lokasinya berada di sentra budidaya.

### Efisiensi Retribusi RPH

Tingkat efisiensi retribusi RPH diukur dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penerimaan dengan realisasi penerimaan pendapatan retribusi RPH. Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan adalah upah/honorarium petugas RPH dalam tahun bersangkutan. Besaran tingkat efisiensi retribusi RPH dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4. Tingkat Efisiensi Retribusi RPH Kabupaten Tebo Tahun 2010-2015**

Tahun	Biaya (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (%)	Kriteria
2010	51.840.000	14.160.000	366,10	Tidak Efisien
2011	51.840.000	14.840.000	349,33	Tidak Efisien
2012	43.200.000	17.360.000	248,85	Tidak Efisien
2013	60.000.000	20.890.000	287,22	Tidak Efisien
2014	60.000.000	25.250.000	237,62	Tidak Efisien
2015	72.000.000	18.550.000	388,14	Tidak Efisien
Rata-rata	56.480.000,00	18.508.333,33	312,88	Tidak Efisien

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Perikanan dan Peternakan (data diolah)

Tingkat efisiensi retribusi RPH menunjukkan kriteria tidak efisien dengan rata-rata 312,88%. Besarnya biaya yang digunakan tidak sebanding dengan realisasi penerimaan retribusi RPH. Biaya tersebut merupakan honorarium petugas RPH yang berjumlah 6 orang.

Dinas Perikanan dan Peternakan berkewajiban melayani masyarakat sektor perikanan dan peternakan agar dapat berswasembada daging dan ikan disamping juga menghasilkan pendapatan daerah berupa PAD. Kinerja pendapatan terutama efisiensi penerimaan retribusi RPH bersifat relatif. Hal ini dilihat dari konsep yang dikemukakan oleh Mahmudi (2005), suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan input yang rendah, atau dengan *input* tertentu menghasilkan output yang besar. Efisiensi dapat dilakukan apabila : *output* meningkat untuk jumlah *input* yang sama, *output* meningkat dengan proporsi *output* yang lebih besar dibandingkan proporsi kenaikan *input*, *input* menurun untuk jumlah *output* yang sama, *input* menurun dengan proporsi penurunan yang lebih besar dibandingkan proporsi penurunan *output*.

Berdasarkan teori tersebut, maka penerimaan retribusi RPH tahun 2011 lebih efisien dibandingkan tahun 2010 dikarenakan biaya yang dikeluarkan sama dan realisasinya meningkat. Pada tahun 2014 retribusi RPH sangat efisien dibandingkan tahun 2013, dikarenakan biaya yang dikeluarkan sama besarnya namun realisasi yang diperoleh lebih besar dari tahun 2013. Selanjutnya tahun 2015 retribusi RPH tidak efisien dikarenakan adanya peningkatan biaya yang dikeluarkan sementara realisasinya menurun. Dengan demikian Dinas Perikanan dan Peternakan harus menjaring wajib retribusi baru dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan dan optimalisasi SDM yang dimiliki.

### **Efisiensi Penjualan Hasil Peternakan**

Tingkat efisiensi penjualan hasil peternakan diukur dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penerimaan penjualan hasil peternakan dengan realisasi penerimaan penjualan hasil peternakan. Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan adalah honorarium tim redist ternak milik pemerintah dalam tahun bersangkutan dan sewa mobil untuk redistribusi ternak. Besaran tingkat efisiensi penjualan hasil peternakan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5. Tingkat Efisiensi Penjualan Hasil Peternakan Kab. Tebo Tahun 2010-2015**

Tahun	Biaya (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (%)	Kriteria
2010	2.500.000	26.817.600	9,32	Sangat Efisien
2011	2.500.000	140.292.000	1,78	Sangat Efisien
2012	2.000.000	76.633.000	2,61	Sangat Efisien
2013	2.000.000	48.760.000	4,10	Sangat Efisien
2014	3.800.000	106.932.000	3,55	Sangat Efisien
2015	10.100.000	180.482.000	5,60	Sangat Efisien
Rata-rata	3.816.666,67	96.652.766,67	4,49	Sangat Efisien

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Perikanan dan Peternakan (data diolah)

Berdasarkan Tabel 5, menunjukkan bahwa tingkat efisiensi penjualan hasil peternakan berada dalam kriteria sangat efisien dengan rata-rata 4,49%. Jika dilihat perbandingan pertahunnya berdasarkan konsep efisiensi dari Mahmudi (2005), Tahun 2011 realisasi yang diperoleh lebih besar dari tahun sebelumnya dengan biaya yang sama sehingga tahun 2011 sangat efisien. Pada tahun 2012, proporsi penurunan biaya lebih sedikit dibandingkan proporsi penurunan realisasi sehingga tahun 2012 tidak efisien dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 terjadi kenaikan biaya dengan proporsi yang lebih rendah dari peningkatan realisasinya sehingga penjualan hasil peternakan sangat efisien, namun pada tahun 2015 proporsi kenaikan biaya lebih besar dari proporsi kenaikan realisasi sehingga penjualan hasil peternakan tidak efisien



dibandingkan tahun sebelumnya. Agar penjualan hasil peternakan tetap efisien, proporsi kenaikan biaya harus lebih rendah dari proporsi kenaikan realisasinya. Peningkatan realisasi dapat dilakukan dengan meningkatkan produktivitas ternak melalui inseminasi buatan, pengawasan dan memaksimalkan penarikan setoran ternak, serta mengoperasikan UPTD pakan dan perbibitan ternak sehingga penjualan hasil peternakan tidak hanya terfokus pada setoran ternak gaduhan.

### **Efisiensi Penjualan Hasil Perikanan**

Tingkat efisiensi penjualan hasil perikanan diukur dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penerimaan penjualan hasil perikanan dengan realisasi penerimaan penjualan hasil perikanan. Biaya yang dikeluarkan adalah upah/honorarium petugas BBI dalam tahun bersangkutan. Besaran tingkat efisiensi penjualan hasil perikanan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 7. Tingkat Efisiensi Penjualan Hasil Perikanan Kabupaten Tebo Tahun 2010-2015**

Tahun	Biaya (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (%)	Kriteria
2010	81.120.000	26.728.500	303,50	Tidak Efisien
2011	81.120.000	31.195.500	260,04	Tidak Efisien
2012	85.920.000	29.283.500	293,41	Tidak Efisien
2013	112.800.000	42.231.000	267,10	Tidak Efisien
2014	112.800.000	19.508.000	578,22	Tidak Efisien
2015	112.800.000	25.622.000	440,25	Tidak Efisien
Rata-rata	97.760.000	29.094.750	357,09	Tidak Efisien

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Perikanan dan Peternakan (data diolah)

Berdasarkan Tabel 7 terlihat bahwa tingkat efisiensi penjualan hasil perikanan Kabupaten Tebo masih berada dalam kriteria tidak efisien dengan rata-rata 357,09%. Masih sedikitnya penerimaan penjualan hasil perikanan yang dilakukan BBI tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Biaya tersebut berupa honorarium petugas teknis, petugas harian dan petugas jaga BBI. Namun jika melihat efisiensinya dengan membandingkan biaya dan realisasi pertahun menurut Mahmudi (2005) yaitu efisiensi dapat dilakukan apabila : *output* meningkat untuk jumlah *input* yang sama, *output* meningkat dengan proporsi *output* yang lebih besar dibandingkan proporsi kenaikan *input*, *input* menurun untuk jumlah *output* yang sama, *input* menurun dengan proporsi penurunan yang lebih besar dibandingkan proporsi penurunan *output*. Maka penerimaan penjualan hasil perikanan tahun 2011 lebih efisien dibandingkan tahun 2010 dikarenakan adanya kenaikan realisasi dengan biaya yang tetap. Tahun 2014 penjualan hasil perikanan tidak efisien dikarenakan realisasi yang turun sementara biaya yang dikeluarkan tetap. Pada tahun 2015 dengan biaya yang tetap sama dengan tahun sebelumnya realisasi meningkat sehingga penjualan hasil perikanan efisien dibandingkan tahun sebelumnya.

Agar penjualan hasil perikanan bisa lebih efisien, proporsi kenaikan biaya harus lebih rendah dari proporsi kenaikan realisasinya. Peningkatan realisasi dapat dilakukan dengan meningkatkan produksi benih dengan mengoptimalkan induk ikan yang ada, merubah pola pemasaran yang lebih aktif dengan cara menjalin kerjasama dengan UPR dan pembudidaya ikan, serta menjual induk yang tidak produktif dalam hal menekan biaya operasional BBI.

## Efektivitas

Tingkat efektivitas diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan pendapatan dengan potensi atau membandingkan realisasi penerimaan dengan target yang telah ditetapkan. Besaran tingkat efektivitas baik berdasarkan potensi maupun berdasarkan target dari masing-masing sumber PAD Dinas Perikanan dan Peternakan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 8. Tingkat Efektivitas Sumber-sumber PAD Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tebo Tahun 2010-2015**

Tahun	Berdasarkan Potensi (%)			Berdasarkan Target (%)		
	R RPH	P H Peternakan	P H Perikanan	R RPH	P H Peternakan	P H Perikanan
2010	8,07	12,99	3,25	141,60	21,45	66,82
2011	7,56	71,98	7,75	118,72	70,15	31,20
2012	3,40	34,27	4,53	115,73	46,30	24,00
2013	5,82	21,67	3,29	139,27	29,46	34,62
2014	6,33	37,40	1,19	157,81	64,61	15,99
2015	5,33	87,55	0,67	123,67	109,05	21,00
Rata-rata	6,08	44,31	3,45	132,80	56,84	32,27

Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Tebo (data diolah)

Tingkat efektivitas retribusi RPH berdasarkan potensi tergolong dalam kriteria tidak efektif dengan rata-rata 6,08%. Masih rendahnya penerimaan retribusi RPH sementara potensi yang seharusnya bisa diperoleh RPH sangat besar, hal ini yang mengakibatkan tingkat efektivitas penerimaan retribusi RPH menjadi tidak efektif. Untuk itu diperlukan perluasan basis retribusi dengan menjaring wajib retribusi baru selain dari pedagang daging. Berdasarkan target berada dalam kriteria sangat efektif dengan rata-rata 132,80%. Tingginya tingkat efektivitas tersebut dikarenakan penetapan target penerimaan yang berada dibawah realisasi penerimaan retribusi RPH, sementara realisasi penerimaan cenderung meningkat setiap tahunnya melebihi dari target yang ditetapkan. Hal ini menguatkan bahwa penetapan target penerimaan tidak berdasarkan potensi ataupun realisasi yang dicapai tahun sebelumnya.

Rata-rata tingkat efektivitas penjualan hasil peternakan berdasarkan potensi sebesar 44,31% dengan kriteria tidak efektif. Hal ini disebabkan potensi penjualan hasil peternakan yang besar sementara realisasi belum mampu mencapai potensi yang ada. Pengawasan dan penarikan setoran ternak gaduhan dapat lebih ditingkatkan. Berdasarkan target, efektivitas rata-rata 56,84% atau kriterianya tidak efektif. Namun sangat efektif pada tahun 2015 sebesar 109,05% dengan kriteria sangat efektif, hal ini menunjukkan adanya upaya untuk peningkatan penerimaan penjualan hasil peternakan salah satunya dengan peningkatan produktivitas ternak melalui inseminasi buatan (IB) harus diprioritaskan pada ternak pemerintah yang digaduhkan kepada masyarakat/ kelompok peternak.

Rata-rata tingkat efektivitas penjualan hasil perikanan berdasarkan potensi sebesar 3,45% dengan kriteria tidak efektif. Hal ini dikarenakan tingginya nilai potensi yang dimiliki oleh BBI, dimana adanya penambahan induk ikan dari tahun 2013 hingga 2015 sehingga perkiraan perhitungan produksi benih menjadi lebih banyak. Banyaknya jumlah induk harus disesuaikan dengan kapasitas dan daya tampung kolam induk dan kolam pendederan benih agar semua induk dapat dimanfaatkan secara optimal dalam memproduksi benih ikan. Berdasarkan target, rata-rata 32,27% dan kriterianya tidak efektif. Masih kecilnya tingkat efektivitas ini disebabkan oleh pola pemasaran yang pasif hanya menunggu pembeli benih yang datang, seharusnya BBI dapat lebih aktif

memasarkan produknya seperti mengadakan kerjasama dengan unit pembenihan rakyat dan pmbudidaya ikan.

### Kontribusi

Rata-rata kontribusi dari masing-masing sumber penerimaan PAD pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tebo tahun 2010-2015, terhadap PAD Kabupaten Tebo dan komponen-komponennya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 9. Rata-rata Kontribusi Sumber Penerimaan PAD Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tebo Tahun 2010-2015**

No	Sumber PAD	Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Daerah	PAD Kab. Tebo
1	Retribusi RPH	1,86 %	0,27%	0,06%
		Hasil Penjualan Aset daerah Yang Tidak Dipisahkan	Lain-lain PAD yang Sah	
2	Penjualan Hasil Peternakan	27,56%	0,96%	0,30%
3	Penjualan Hasil Perikanan	8,45%	0,33%	0,11%
4	Dinas Perikanan dan Peternakan			0,47%

Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Tebo (data diolah)

Berdasarkan Tabel 8 tergambar bahwa rata-rata kontribusi sumber PAD Dinas Perikanan dan Peternakan terhadap PAD Kabupaten Tebo dan komponen-komponennya dikategorikan sangat kurang, hanya penjualan hasil peternakan terhadap hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan yang kontribusinya dalam kategori sedang. Masih rendahnya kontribusi disebabkan masih rendahnya realisasi penerimaan dari sumber-sumber PAD pada Dinas Perikanan dan Peternakan. Semestinya jika dilihat dari tingginya potensi penerimaan yang seharusnya dapat direalisasikan, maka secara tidak langsung dapat diperkirakan besaran kontribusi yang dihasilkan dari penerimaan PAD Dinas Perikanan dan Peternakan terhadap PAD Kabupaten Tebo dan komponennya. Namun kenyataannya penerimaan PAD Dinas Perikanan dan Peternakan belum terealisasi sesuai target maupun potensi yang ada. Belum optimalnya pemungutan dari masing-masing sumber PAD disebabkan oleh berbagai macam kendala maupun hambatan baik internal maupun eksternal sehingga diperlukan adanya upaya atau strategi dalam meningkatkan penerimaan PAD Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tebo.

### Strategi Peningkatan Penerimaan Retribusi RPH

#### Analisis Lingkungan Internal

Tujuan dari analisis lingkungan internal adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang mempengaruhi penerimaan retribusi RPH di Kabupaten Tebo. Faktor kekuatan ini dapat bermanfaat bagi unit kerja, sedangkan faktor kelemahan akan menjadi kendala dalam penerimaan retribusi RPH. Setelah faktor internal dikelompokkan menjadi kekuatan dan kelemahan, langkah selanjutnya adalah melakukan pembobotan, rating dan penilaian skor dari *Internal Factor Analysis System (IFAS)* penerimaan retribusi RPH.

#### Faktor Kekuatan :

1. Adanya program dan anggaran untuk RPH dari Dinas Perikanan dan Peternakan.
2. Memiliki petugas berpengalaman dan cukup terampil

3. Pemotongan di RPH sejak tahun 2007
4. Adanya peraturan mengenai retribusi RPH

#### Kelemahan

1. Kekurangan petugas RPH
2. Hanya memiliki 2 unit RPH
3. Sarana dan prasarana yang masih minim
4. Masih menggunakan pemotongan secara tradisional
5. Masih kurangnya sosialisasi dan promosi

#### **Analisis Lingkungan Eksternal**

Tujuan dari analisis lingkungan eksternal adalah untuk mengetahui peluang dan ancaman yang mempengaruhi penerimaan retribusi RPH di Kabupaten Tebo. Faktor peluang ini dapat memberikan keuntungan dalam penerimaan retribusi RPHH, sedangkan faktor ancaman akan menjadi kendala dalam penerimaan penerimaan retribusi RPH. Setelah faktor eksternal dikelompokkan menjadi peluang dan ancaman, langkah selanjutnya adalah melakukan pembobotan, rating dan penilaian skor dari *Eksternal Factor Analysis System (EFAS)* penerimaan retribusi RPH

#### Faktor Peluang

1. Perkembangan teknologi pemotongan ternak
2. Tingkat konsumsi daging yang cukup tinggi
3. Tuntutan keamanan hasil produk ternak yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH)
4. Kebijakan pemerintah
5. Banyaknya jumlah pesta dan kegiatan keagamaan

#### Faktor Ancaman

1. Banyaknya yang tidak memotong ternak (sapi dan kerbau) di RPH
2. Ternak kecil (kambing dan domba) tidak dipotong di RPH
3. Belum menggunakan teknologi pemotongan yang modern
4. Minat masyarakat memotong ternak di RPH masih kurang
5. Masuknya daging dari daerah lain

#### **Perumusan Strategi**

Untuk mengetahui prioritas strategi berdasarkan pembobotan SWOT-nya, maka dilakukan kombinasi strategi internal dan eksternal. Matrik SWOT merupakan tahap mengkombinasikan masing-masing faktor untuk menghasilkan alternatif strategi yang dibutuhkan. Perumusan strategi peningkatan penerimaan retribusi RPH disusun berdasarkan faktor internal (*strength dan weakness*) dan faktor eksternal (*opportunity dan threat*) ke dalam matriks interaksi IFAS-EFAS SWOT (Lihat Lampiran 1):

Setelah dilakukan pemberian skor atau penilaian, maka disusun skala prioritas strategi berdasarkan kombinasi strategi yang memiliki nilai paling tinggi sampai dengan yang paling rendah sehingga didapat urutan alternatif strategi SWOT dalam tabel berikut :

**Tabel 10. Urutan Alternatif Strategi SWOT Penerimaan Retribusi RPH**

Prioritas	Strategi	Skor
I	Weakness – Opportunity (WO)	3,45
II	Weakness – Threat (WT)	3,35
III	Strength – Opportunity (SO)	3,15
IV	Strength – Threat (ST)	3,05

Sumber : Matriks Interaksi IFAS-EFAS

Hasil interaksi IFAS-EFAS berdasarkan Tabel 10 menghasilkan alternatif strategi dalam penerimaan retribusi RPH yang mendapat skor paling tinggi adalah Weakness – Opportunity (WO), yang dapat diterjemahkan sebagai strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Perumusan strategi dalam upaya peningkatan penerimaan retribusi RPH merupakan kombinasi dari faktor kelemahan dan ancaman sebagai berikut :

1. memperbaiki cara pemotongan menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi pemotongan ternak yang semakin berkembang
2. menambah petugas RPH yang berpengalaman serta meningkatkan sarana dan prasarana untuk meningkatkan penerimaan retribusi RPH dengan menjaring wajib retribusi dari banyaknya jumlah pesta dan kegiatan keagamaan serta melayani kebutuhan daging di Kabupaten Tebo
3. melakukan sosialisasi dan promosi arti pentingnya retribusi dan pemotongan ternak di RPH dalam memenuhi tuntutan keamanan produk ternak dengan memanfaatkan kebijakan pemerintah

### **Strategi Peningkatan Penerimaan Penjualan Hasil Peternakan**

#### **Analisis Lingkungan Internal**

Tujuan dari analisis lingkungan internal adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang mempengaruhi penjualan hasil peternakan di Kabupaten Tebo. Langkah selanjutnya adalah melakukan pembobotan, rating dan penilaian skor dari *Internal Factor Analysis System (IFAS)* penerimaan penjualan hasil peternakan (sebagai berikut :

##### Faktor Kekuatan

1. Adanya program dan anggaran untuk peningkatan hasil peternakan dari Dinas Perikanan dan Peternakan
2. Memiliki petugas berpengalaman dan cukup terampil
3. Pengembangan ternak sistem gaduhan telah dilakukan dari tahun 2006
4. Adanya peraturan dan perjanjian pengaduan ternak
5. Tersedianya hijauan pakan ternak yang melimpah
6. Jenis ternak yang digaduhkan adalah sapi bali

##### Faktor Kelemahan

1. Pengetahuan peternak masih bersifat tradisional
2. Lokasi gaduhan ternak yang menyebar
3. Cara beternak yang masih semi intensif
4. Ketersediaan sarana dan prasarana yang masih minim

#### **Analisis Lingkungan Eksternal**

Tujuan dari analisis lingkungan eksternal adalah untuk mengetahui peluang dan ancaman yang mempengaruhi penjualan hasil peternakan di Kabupaten Tebo. Setelah faktor eksternal dikelompokkan, langkah selanjutnya adalah melakukan pembobotan, rating dan penilaian skor dari *Eksternal Factor Analysis System (EFAS)* penerimaan penjualan hasil peternakan sebagai berikut :

##### Faktor Peluang

1. Peningkatan populasi ternak ruminansia melalui penerapan good farming practices (GFP)
2. Perkembangan teknologi peternakan
3. Permintaan masyarakat untuk gaduhan ternak tinggi
4. Kebijakan pemerintah
5. Adanya UPTD pakan dan perbibitan ternak

Faktor Ancaman

1. Adanya penyakit ternak
2. Ketidakjujuran penggaduh
3. Beternak sapi merupakan usaha sampingan
4. Perubahan regulasi perguliran ternak
5. Tidak adanya pengadaan ternak untuk pola gaduhan

**Perumusan Strategi**

Perumusan strategi peningkatan penerimaan penjualan hasil peternakan disusun berdasarkan faktor internal (*strength dan weakness*) dan faktor eksternal (*opportunity dan threat*) ke dalam matriks interaksi IFAS-EFAS SWOT (Lihat Lampiran 2):

Setelah dilakukan pemberian skor atau penilaian, maka disusun skala prioritas strategi berdasarkan kombinasi strategi yang memiliki nilai paling tinggi sampai dengan yang paling rendah sehingga didapat urutan alternatif strategi SWOT dalam tabel berikut :

**Tabel 11. Urutan Alternatif Strategi SWOT Penerimaan Penjualan Hasil Peternakan**

Prioritas	Strategi	Skor
I	Strength – Opportunity (SO)	4,10
II	Weakness – Opportunity (WO)	3,25
III	Strength – Threat (ST)	3,00
IV	Weakness – Threat (WT)	2,15

Sumber : Matriks Interaksi IFAS-EFAS

Hasil interaksi IFAS-EFAS menghasilkan alternatif strategi dalam penerimaan penjualan hasil peternakan yang mendapat skor paling tinggi adalah Strength – Opportunity (SO), yang dapat diterjemahkan sebagai strategi yang memaksimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Perumusan strategi dalam upaya peningkatan penerimaan penjualan hasil peternakan merupakan kombinasi dari faktor kekuatan dan peluang, sebagai berikut :

1. dengan adanya program pengembangan populasi ternak sistem gaduhan yang telah dilakukan dari tahun 2006 dapat memaksimalkan populasi ternak ruminansia melalui penerapan good farming practises (GFP) guna memenuhi permintaan gaduhan ternak yang tinggi dari masyarakat terutama jenis sapi bali
2. pengembangan teknologi peternakan untuk menghasilkan jenis ternak unggulan dengan memanfaatkan UPTD pakan dan perbibitan ternak sehingga menghasilkan PAD bagi penjualan hasil peternakan
3. dengan adanya peraturan terkait pola gaduhan dan perjanjian penggaduhan ternak antara pemerintah dengan masyarakat dan tersedianya hijauan pakan ternak yang melimpah di Kabupaten Tebo dapat memaksimalkan jumlah populasi ternak gaduhan didukung dengan adanya petugas yang terampil dan berpengalaman

**Strategi Peningkatan Penerimaan Penjualan Hasil Perikanan****Analisis Lingkungan Internal**

Tujuan dari analisis lingkungan internal adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang mempengaruhi penjualan hasil perikanan di Kabupaten Tebo. Langkah selanjutnya adalah melakukan pembobotan, rating dan penilaian skor dari *Internal Factor Analysis System (IFAS)* penerimaan penjualan hasil perikanan sebagai berikut :

Faktor Kekuatan

1. Adanya anggaran untuk operasional perbenihan dari Dinas Perikanan dan Peternakan

2. Memiliki tenaga kerja berpengalaman dan cukup terampil
3. Usaha perbenihan telah dilakukan dari tahun 2007
4. Jenis benih ikan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan budidaya
5. Induk ikan berkualitas
6. Mempunyai sertifikat cara pembenihan ikan yang baik (CPIB) dari Direktorat Perbenihan Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan
7. Sarana dan prasarana perbenihan yang memadai

#### Faktor Kelemahan

1. Daya tampung benih yang masih belum memadai
2. Kekurangan tenaga teknis
3. Produksi benih belum optimal
4. Lokasi BBI yang jauh dari sentra budidaya
5. Kurangnya promosi
6. Harga jual benih menyesuaikan dengan harga pasar
7. Kondisi kolam yang perlu perbaikan
8. Cara pembenihan masih terbatas

#### **Analisis Lingkungan Eksternal**

Tujuan dari analisis lingkungan eksternal adalah untuk mengetahui peluang dan ancaman yang mempengaruhi penjualan hasil perikanan di BBI Kabupaten Tebo. Langkah selanjutnya adalah melakukan pembobotan, rating dan penilaian skor dari *Eksternal Factor Analysis System (EFAS)* penerimaan penjualan hasil perikanan sebagai berikut :

#### Faktor Peluang

1. Program kerja BBI yang tidak hanya memproduksi benih tetapi juga menerima siswa magang
2. Adanya kesempatan mengikuti pelatihan CPIB bagi pekerja
3. Perkembangan teknologi pembenihan ikan
4. Meningkatnya produksi budidaya perikanan
5. Kebijakan pemerintah (penjabaran visi dan misi Bupati Tebo 2011-2016)

#### Faktor Ancaman

1. Adanya pesaing di lokasi budidaya/ pasar
2. Alih fungsi lahan budidaya
3. Masuknya benih dari daerah lain
4. Produksi tergantung pada musim dan kondisi air
5. Penyakit dan predator yang menyerang benih dan induk ikan
6. Penerapan teknologi belum dimanfaatkan secara optimal
7. Budidaya ikan masih merupakan usaha sampingan

#### **Perumusan Strategi**

Perumusan strategi peningkatan penerimaan penjualan hasil perikanan disusun berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal ke dalam matriks IFAS-EFAS SWOT (Lihat Lampiran 3).

Setelah dilakukan pemberian skor atau penilaian, maka disusun skala prioritas strategi berdasarkan kombinasi strategi yang memiliki nilai paling tinggi sampai dengan yang paling rendah sehingga didapat urutan alternatif strategi SWOT dalam tabel berikut :

**Tabel 12 Urutan Alternatif Strategi SWOT Penerimaan Penjualan Hasil Perikanan**

Prioritas	Strategi	Skor
I	Strength – Threat (ST)	2,90
II	Weakness – Threat (WT)	2,85
III	Strength – Opportunity (SO)	2,75
IV	Weakness – Opportunity (WO)	2,70

Sumber : Matriks Interaksi IFAS-EFAS

Hasil interaksi IFAS-EFAS menghasilkan alternatif strategi dalam penerimaan penjualan hasil perikanan yang mendapat skor paling tinggi adalah Strength – Threat (ST), yang dapat diterjemahkan sebagai strategi yang memaksimalkan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Perumusan strategi dalam upaya peningkatan penerimaan penjualan hasil perikanan merupakan kombinasi dari faktor kekuatan dan peluang sebagai berikut :

1. mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi pembudidaya ikan agar rutin melakukan usaha perikanan sehingga membutuhkan benih ikan berkualitas dari BBI
2. mengelola dengan baik usaha pembenihan dan bekerja sama dengan UPR untuk meningkatkan kualitas mutu benih ikan di Kabupaten Tebo sehingga pembudidaya ikan tidak membeli benih dari luar daerah
3. mengatur tugas dan fungsi dari pekerja di BBI dalam rangka memproduksi benih dan distribusi benih ikan ke pembudidaya, melakukan promosi untuk dapat bersaing dengan unit pembenihan rakyat sehingga penjualan hasil perikanan meningkat
4. pemanfaatan sarana dan prasarana dan memanfaatkan teknologi perbenihan secara optimal agar dapat memproduksi benih secara rutin dan tidak tergantung pada musim dan kondisi air serta dapat mengendalikan penyakit ikan dan predator yang menyerang benih dan induk ikan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Potensi penerimaan dari masing-masing sumber PAD Dinas Perikanan dan Peternakan tahun 2010-2015 lebih besar dari target yang telah ditetapkan.
2. Tingkat efisiensi Penerimaan retribusi RPH dan penjualan hasil perikanan tidak efisien dikarenakan besarnya biaya yang digunakan untuk memperoleh penerimaan sementara realisasinya masih sedikit, sedangkan Penerimaan penjualan hasil peternakan sangat efisien dikarenakan realisasi penerimaan lebih besar dari jumlah biaya yang diperlukan untuk memperoleh penerimaan
3. Tingkat efektivitas penerimaan masing-masing sumber PAD Dinas Perikanan dan Peternakan tahun 2010-2015 berdasarkan potensi yang dihitung tidak efektif dikarenakan realisasi yang rendah sementara potensinya besar. Sementara berdasarkan Target yang ditetapkan hanya penerimaan retribusi RPH sangat efektif karena target yang ditetapkan berada dibawah realisasi tahun sebelumnya.
4. Tingkat kontribusi penerimaan masing-masing sumber PAD Dinas Perikanan dan Peternakan tahun 2010-2015 terhadap PAD Kabupaten Tebo dan komponennya masih sangat kurang.
5. Berdasarkan analisis SWOT, alternatif strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan masing-masing sumber PAD yakni retribusi RPH menggunakan strategi WO (Weakness-Opportunity), penjualan hasil peternakan menggunakan strategi SO (Strength-Opportunity), dan penjualan hasil perikanan menggunakan strategi ST (Strength-Threat).



## Saran

1. Penetapan target penerimaan PAD harus disesuaikan dengan potensi yang ada. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tebo setiap tahunnya harus menghitung potensi penerimaan dari masing-masing sumber PAD yang dikelolanya, sehingga dalam perencanaan penetapan target anggaran penerimaan dapat disesuaikan atau mendekati potensi yang ada
2. Dinas Perikanan dan Peternakan perlu mengadakan evaluasi dalam efisiensi penggunaan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemungutan penerimaan PAD. Salah satunya dengan memaksimalkan kinerja petugas dalam pendistribusian tugas dan tanggung jawab.
3. Dinas Perikanan dan Peternakan harus mempertahankan dan terus meningkatkan realisasi penerimaan PAD yang dikelolanya agar lebih efektif perlu dilakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD dengan cara :
  - a. Melakukan sosialisasi secara intensif kepada wajib retribusi tentang manfaat dari retribusi yang dibayarkan baik bagi wajib retribusi maupun bagi pemerintah daerah.
  - b. Menjaring wajib retribusi baru yang belum dikenai pungutan retribusi sebelumnya dengan meningkatkan kegiatan pemeriksaan kesehatan dan pengawasan ternak wilayah Kabupaten Tebo.
  - c. Melakukan pembinaan mengenai pemeliharaan ternak, pengoptimalan lahan, integrasi ternak dengan tanaman, serta pemberdayaan peternak; pemeriksaan kesehatan dan reproduksi ternak; dan pengawasan secara rutin terhadap kelompok penerima ternak gaduhan agar setoran ternak untuk PAD dapat dipungut secara optimal
  - d. Memaksimalkan kinerja UPTD Pakan dan Pembibitan Ternak untuk menghasilkan bibit ternak unggulan yang dapat dijual kepada masyarakat sehingga penjualan hasil peternakan dapat meningkat dan tidak tergantung pada setoran hasil ternak gaduhan.
  - e. Menjaga kontinuitas produksi benih meskipun pada musim hujan dan kemarau dengan pemanfaatan sarana dan prasarana serta teknologi perbenihan sesuai CPIB.
  - f. Pihak BBI harus lebih aktif melakukan pemasaran benih ikan dengan melakukan kegiatan promosi dan kerjasama dengan pembudidaya ikan maupun terhadap unit pembenihan rakyat agar jumlah penjualan meningkat sehingga dapat meningkatkan PAD
4. Untuk lebih meningkatkan kontribusi sumber penerimaan PAD Dinas Perikanan dan Peternakan terhadap PAD Kabupaten Tebo dan Komponennya, maka Dinas Perikanan dan Peternakan harus dapat merealisasikan penerimaan masing-masing sumber PAD yang dikelolanya sesuai dengan potensi yang ada. Diperlukan upaya memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki dengan meminimalkan keterbatasan yang ada untuk memperoleh peluang dalam peningkatan penerimaan PAD serta mampu mengatasi ancaman yang dapat menurunkan penerimaan PAD.
5. Alternatif strategi yang dihasilkan dengan analisis SWOT perlu dijabarkan dalam bentuk kebijakan yang dituangkan melalui program dan kegiatan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tebo untuk mencapai peningkatan penerimaan PAD yang optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Amri., Junaidi, Yulmardi. 2009. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya*. IPB Press. Bogor.
- Anonim, 2001. *Keputusan Menteri Pertanian Nomor 417/Kpts/OT.210/7/2001 Tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak*
- \_\_\_\_\_, 2011. *Peraturan Bupati Tebo Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pola Gaduhan Ternak Pemerintah Daerah*
- \_\_\_\_\_, 2013. *Peraturan Bupati Tebo Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan*
- \_\_\_\_\_, 2013. *Keputusan Bupati Tebo Nomor 103 Tahun 2013 Tentang Penetapan Harga Penjualan Benih Ikan dan Calon Induk Ikan UPTD BBI Kabupaten Tebo*
- \_\_\_\_\_, 2014. *Peraturan Bupati Tebo Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pola Gaduhan Ternak Pemerintah Daerah*
- \_\_\_\_\_, *Tebo Dalam Angka Tahun 2010-2015*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tebo
- Darwin. 2010. *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*. Mitra Wacana Media. Jakarta
- Devita, Andri., Arman Delis, Junaidi. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi*. Program Magister Ilmu Ekonomi Universitas Jambi. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol.2 No.2, Oktober-Desember 2014.ISSN: 2338-4603.
- Harun, Hamroeli. 2003. *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*. BPFE. Yogyakarta
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta
- \_\_\_\_\_. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Panggalo, Rafika Rante. 2015. *Analisis Kontribusi dan Potensi Retribusi Rumah Potong Hewan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Patandianan, Eduard Eddyson. 2012. *Determinan Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan Tahun 2001-2011*. Program Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Rangkuti, Freddy. 2014. *Analisis Swot, Teknik Membedah Kasus Bisnis, Cara Perhitungan Bobot, Rating dan OCAI*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Tan, Syamsurijal. 2010. *Perencanaan Pembangunan (Teori dan Implementasi Pada Pembangunan Daerah)*. Fakultas Ekonomi UNJA. Jambi

**Lampiran 1. Matriks Interaksi IFAS – EFAS SWOT Penerimaan Retribusi RPH**

<p><b>I F A S</b></p>	<p><b>Strength</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.adanya program dan anggaran untuk RPH dari Dinas Perikanan dan Peternakan</li> <li>2.memiliki petugas berpengalaman dan cukup terampil</li> <li>3.pemotongan di RPH sejak tahun 2007</li> <li>4.adanya peraturan mengenai retribusi RPH</li> </ol> <p>1,5</p>	<p><b>Weakness</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.kekurangan petugas RPH</li> <li>2.hanya memiliki 2 unit RPH</li> <li>3.sarana dan prasarana yang masih minim</li> <li>4.masih menggunakan pemotongan secara tradisional</li> <li>5.masih kurangnya sosialisasi dan promosi</li> </ol> <p>1,8</p>
<p><b>E F A S</b></p>		
<p><b>Opportunity</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.perkembangan teknologi pemotongan ternak</li> <li>2.tingkat konsumsi daging yang cukup tinggi</li> <li>3.tuntutan keamanan produk hasil ternak yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH)</li> <li>4.kebijakan pemerintah (penjabaran visi dan misi bupati tebo 2011-2016)</li> <li>5.banyaknya jumlah pesta dan kegiatan keagamaan</li> </ol> <p>1,65</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.dengan adanya tuntutan keamanan produk hasil ternak yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) guna mendukung kebijakan pemerintah daerah yang dijabarkan dalam visi dan misi bupati tebo 2011-2016 dirumuskan dalam program dan anggaran untuk RPH dari Dinas Perikanan dan Peternakan</li> <li>2.mengembangkan teknologi pemotongan ternak dengan memaksimalkan petugas RPH yang berpengalaman dan cukup terampil</li> <li>3.dengan banyaknya jumlah pesta dan kegiatan keagamaan serta tingkat konsumsi daging yang cukup tinggi di Kabupaten Tebo, pungutan retribusi RPH dapat dimaksimalkan dengan memperluas basis pemotongan ternak dan dituangkan dalam peraturan daerah ataupun peraturan bupati</li> </ol> <p>3,15</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.memperbaiki cara pemotongan menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi pemotongan ternak yang semakin berkembang</li> <li>2.menambah petugas RPH yang berpengalaman serta meningkatkan sarana dan prasarana untuk meningkatkan penerimaan retribusi RPH dengan menjangkau wajib retribusi dari banyaknya jumlah pesta dan kegiatan keagamaan serta melayani kebutuhan daging di Kabupaten Tebo</li> <li>3.melakukan sosialisasi dan promosi dalam memenuhi tuntutan keamanan produk ternak dengan memanfaatkan kebijakan pemerintah</li> </ol> <p>3,45</p>
<p><b>Threat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.banyak yang tidak memotong ternak (sapi dan Kerbau) di RPH</li> <li>2.ternak kecil (kambing dan domba) tidak dipotong di RPH</li> <li>3.belum menggunakan teknologi pemotongan yang modern</li> <li>4.minat masyarakat memotong ternak di RPH masih kurang</li> <li>5.masuknya daging dari daerah lain</li> </ol> <p>1,55</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.mengelola dengan baik kegiatan pemotongan di RPH yang telah berlangsung sejak tahun 2007 dengan memanfaatkan petugas yang berpengalaman dan terampil agar minat masyarakat untuk memotong ternaknya di RPH menjadi semakin meningkat</li> <li>2.membuat dan mensosialisasikan peraturan mengenai pemotongan ternak dan retribusi RPH agar semua ternak besar dan ternak kecil dipotong dalam RPH</li> <li>3.mengembangkan program pengawasan lalu lintas ternak dan pengawasan daging yang dijual di pasar untuk mencegah masuknya daging dari daerah lain yang belum terjamin kesehatan dan kualitasnya</li> </ol> <p>3,05</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.meningkatkan intensitas sosialisasi dan promosi kepada masyarakat dan pedagang daging untuk memotong ternak kecil dan besar di RPH</li> <li>2.menambah unit RPH dan petugasnya di daerah untuk meningkatkan pungutan retribusi RPH bagi masyarakat yang memotong ternaknya tidak di RPH serta menghindari masuknya daging dari daerah lain</li> <li>3.memperbaiki teknik dan cara pemotongan dengan menggunakan teknologi pemotongan yang lebih modern agar lebih higienis dan efisien sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk memotong ternaknya di RPH</li> </ol> <p>3,35</p>

Sumber : Interaksi IFAS-EFAS (data diolah)

### Lampiran 2. Matriks Interaksi IFAS–EFAS SWOT Penerimaan Penjualan Hasil Peternakan

<p style="text-align: center;">I F A S</p>	<p>Strength</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.adanya program dan anggaran untuk peningkatan hasil peternakan dari Dinas Perikanan dan Peternakan</li> <li>2.memiliki petugas berpengalaman dan cukup terampil</li> <li>3.pengembangan ternak sistem gaduhan telah dilakukan dari tahun 2006</li> <li>4.adanya peraturan dan perjanjian penggaduhan ternak</li> <li>5.tersedianya hijauan pakan ternak yang melimpah</li> <li>6.jenis ternak yang digaduhkan adalah sapi bali</li> </ol> <p>1,95</p>	<p>Weakness</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengetahuan peternak masih bersifat tradisional</li> <li>2. lokasi gaduhan ternak yang menyebar</li> <li>3. cara beternak yang masih semi intensif</li> <li>4. ketersediaan sarana dan prasarana masih minim</li> </ol> <p>1,1</p>
<p style="text-align: center;">E F A S</p> <p>Opportunity</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.peningkatan populasi ternak ruminansia melalui penerapan good farming practices (GFP)</li> <li>2.perkembangan teknologi peternakan</li> <li>3.permintaan masyarakat untuk gaduhan ternak tinggi</li> <li>4.kebijakan pemerintah (penjabaran visi dan misi bupati tebo 2011-2016)</li> <li>5.adanya UPTD pakan dan perbibitan ternak</li> </ol> <p>2,15</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.dengan adanya program pengembangan populasi ternak sistem gaduhan yang telah dilakukan dari tahun 2006 dapat memaksimalkan populasi ternak ruminansia melalui penerapan good farming practises (GFP) guna memenuhi permintaan gaduhan ternak yang tinggi dari masyarakat terutama jenis sapi bali</li> <li>2.pengembangan teknologi peternakan untuk menghasilkan jenis ternak unggulan dengan memanfaatkan UPTD pakan dan perbibitan ternak sehingga menghasilkan PAD bagi penjualan hasil peternakan</li> <li>3.dengan adanya peraturan terkait pola gaduhan dan perjanjian penggaduhan ternak antara pemerintah dengan masyarakat dan tersedianya hijauan pakan ternak yang melimpah di Kabupaten Tebo dapat memaksimalkan jumlah populasi ternak gaduhan didukung dengan adanya petugas yang terampil dan berpengalaman</li> </ol> <p>4,1</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. meningkatkan sarana dan prasarana UPTD pakan dan perbibitan ternak untuk menghasilkan jenis ternak unggulan yang dapat dijual kepada masyarakat</li> <li>2. melakukan pembinaan kepada peternak yang masih bersifat tradisional mengenai perkembangan teknologi dalam bidang peternakan terutama mengenai cara beternak yang intensif</li> <li>3. penyebaran dan pengembangan ternak gaduhan dilakukan dalam beberapa lokasi untuk memudahkan pembinaan dan peningkatan populasi ternak ruminansia.</li> </ol> <p>3,25</p>
<p>Threat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Adanya penyakit ternak</li> <li>2.ketidakjujuran penggaduh</li> <li>3.beternak sapi merupakan usaha sampingan</li> <li>4.perubahan regulasi perguliran ternak</li> <li>5.tidak adanya pengadaan ternak untuk pola gaduhan</li> </ol> <p>1,05</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.pengembangan ternak gaduhan jenis sapi bali yang tidak mudah terkena penyakit</li> <li>2.melakukan pengawasan melalui petugas pengelola ternak pemerintah untuk menghindari ketidakjujuran peternak dengan berpedoman pada peraturan dan perjanjian penggaduhan ternak</li> <li>3.membuat dan menerapkan regulasi atau peraturan penggaduhan ternak untuk memaksimalkan penerimaan PAD dan menganggarkan pengadaan ternak</li> </ol> <p>3</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan sosialisasi kepada peternak untuk melakukan usaha ternak sapi secara intensif serta merubah pola pikir peternak yang masih tradisional</li> <li>2. meningkatkan sarana dan prasarana peternakan untuk pencegahan penyakit ternak dan pengobatannya</li> <li>3. melaksanakan pengadaann ternak gaduhan pada satu lokasi untuk memudahkan pembinaan dan pengawasan serta penerapan perjanjian pola penggaduhan ternak</li> </ol> <p>2,15</p>

Sumber : Interaksi IFAS-EFAS (data diolah)

**Lampiran 3 Tabel 15 Matriks Interaksi IFAS–EFAS SWOT Penerimaan Penjualan Hasil Perikanan**

<p style="text-align: center;">I F A S</p> <p style="text-align: center;">E F A S</p>	<p>Strength</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. adanya anggaran untuk operasional perbenihan dari Dinas Perikanan dan Peternakan</li> <li>2. memiliki tenaga kerja berpengalaman dan cukup terampil</li> <li>3. usaha perbenihan telah dilakukan dari tahun 2007</li> <li>4. jenis benih ikan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan budidaya</li> <li>5. induk ikan berkualitas</li> <li>6. mempunyai sertifikat cara pembenihan ikan yang baik (CPIB) dari Dirjen Perbenihan Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> <li>7. sarana dan prasarana perbenihan yang memadai</li> </ol> <p>1,35</p>	<p>Weakness</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. daya tampung benih yang masih belum memadai</li> <li>2. kekurangan tenaga teknis</li> <li>3. produksi benih belum optimal</li> <li>4. lokasi BBI yang jauh dari sentra budidaya</li> <li>5. kurangnya promosi</li> <li>6. harga jual benih menyesuaikan dengan harga pasar</li> <li>7. kondisi kolam yang perlu perbaikan</li> <li>8. cara pembenihan masih terbatas</li> </ol> <p>1,3</p>
<p>Opportunity</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. program kerja BBI yang tidak hanya memproduksi dan menjual benih tetapi juga menerima siswa magang</li> <li>2. adanya kesempatan mengikuti pelatihan CPIB bagi pekerja</li> <li>3. perkembangan teknologi pembenihan ikan</li> <li>4. meningkatnya produksi budidaya perikanan</li> <li>5. kebijakan pemerintah (penjabaran visi dan misi bupati tebo 2011-2016)</li> </ol> <p>1,4</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. dengan meningkatnya produksi budiaya ikan, BBI harus memproduksi jenis benih ikan yang sesuai dengan kebutuhan budidaya sehingga meningkatkan penjualan hasil perikanan</li> <li>2. mengembangkan kompetensi tenaga kerja yang telah berpengalaman dan terampil dengan pelatihan CPIB dan mempertahankan usaha perbenihan yang telah dilakukan sejak tahun 2007 dengan status baik dalam sertifikasi CPIB dari dirjen perbenihan kementerian kelautan dan perikanan, yang telah didukung sarana dan prasarana pembenihan yang memadai dan memiliki induk ikan yang berkualitas</li> </ol> <p>2,75</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. dengan adanya anggaran dan program kerja BBI yang menerima siswa magang merupakan bentuk promosi dan sosialisasi BBI, selain itu promosi dapat dilakukan oleh Dinas dalam melakukan pembinaan kepada pembudidaya ikan</li> <li>2. meningkatkan kompetensi pekerja untuk mengantisipasi kekuarangan tenaga teknis dengan mengikutsertakan dalam pelatihan CPIB sehingga cara pembenihan menjadi lebih baik</li> <li>3. meningkatkan produksi benih dan meningkatkan jaringan pemasaran di sentra budidaya dengan menurunkan harga jual</li> </ol> <p>2,7</p>
<p>Threat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. adanya pesaing di lokasi budidaya/pasar</li> <li>2. alih fungsi lahan budidaya</li> <li>3. masuknya benih dari daerah lain</li> <li>4. produksi tergantung pada musim dan kondisi air</li> <li>5. penyakit dan predator yang menyerang benih dan induk ikan</li> <li>6. penerapan teknologi belum dimanfaatkan secara optimal</li> <li>7. budidaya ikan masih merupakan usaha sampingan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi pembudidaya ikan agar rutin melakukan usaha perikanan sehingga membutuhkan benih ikan berkualitas dari BBI</li> <li>2. mengelola dengan baik usaha pembenihan dan bekerja sama dengan UPR untuk meningkatkan kualitas mutu benih ikan di Kabupaten Tebo sehingga pembudidaya ikan tidak membeli benih dari luar daerah</li> <li>3. mengatur tugas dan fungsi dari pekerja di BBI dalam rangka memproduksi benih dan distribusi benih ikan ke pembudidaya, melakukan promosi untuk dapat bersaing dengan unit pembenihan rakyat sehingga penjualan hasil perikanan meningkat</li> <li>4. pemanfaatan sarana dan prasarana dan memanfaatkan teknologi perbenihan secara optimal agar dapat memproduksi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan rehab atas kolam agar dapat dipergunakan dengan tidak bergantung pada musim dan kondisi air serta menghindari predator yang menyerang ikan, selain itu perbaikan kolam diperlukan agar dapat meningkatkan daya tampung benih sehingga produksi benih dapat optimal.</li> <li>2. Melakukan kegiatan promosi di lokasi budidaya dan strategi tawar menawar harga agar dapat bersaing dengan penjual benih ikan yang lain meskipun lokasi BBI yang jauh dari sentra budidaya</li> <li>3. Pengembangan dan penerapan teknologi perbenihan dan cara pembenihan ikan sesuai CPIB</li> </ol>

1,55	benih secara rutin dan tidak tergantung pada musim dan kondisi air serta dapat mengendalikan penyakit ikan dan predator yang menyerang benih dan induk ikan.	2,9	2,85
------	--	-----	------

Sumber : Interaksi IFAS-EFAS (data diolah)